

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI



**UJI BEDA TINGKAT KINERJA KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PROPINSI DI WILAYAH JAWA DAN SUMATERA**

TIM PENELITIAN

Ketua

Agus. Zahron Idris S.E., M.Si., Ak., CA
Sinta ID 6681679

Anggota

Fadhilah Nuraini

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

BANDAR LAMPUNG

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN MANDIRI**

Judul Penelitian : **Uji Beda Tingkat Kinerja Keuangan Antara
Pemerintah Propinsi di Wilayah Jawa dan Sumatera**

KetuaPelaksana:

a. Nama Lengkap	: Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA
b. NIDN	: 0011086902
c. SINTA ID	: 6681679
d. Jabatan Fungsional	: Lektor
e. Program Studi	: S1 - Akuntansi
f. Telp/Faks	: 082181829999
g. Alamat Surel (E-mail)	: agus.zahron@yahoo.co.id

Anggota :

a. Nama Lengkap	: Fadhilah Nuraini
b. NIDN	:
c. SINTA ID	:
d. Jabatan Fungsional	:
e. Program Studi	: S1 - Akuntansi
f. Telp/Faks	:
g. Alamat Surel (E-mail)	:

JumlahMahasiswa yang Terlibat	:
Jumlah Alumni yang Terlibat	:
Jumlah Alumni yang Terlibat	:
Lokasi Kegiatan	: Uniersitas Lampung
Lama Kegiatan	: 10 Bulan
Biaya Kegiatan	: -
Sumber Dana	: Mandiri

Bandar Lampung, 2 November 2021

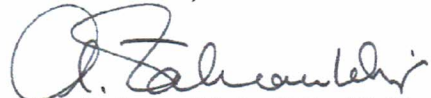
Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

KetuaPeneliti,

Dr. Nairobi S.E., M.Si

NIP 19660621 199003 1 003



Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP 19550503 198603 1 002

Mengetahui:

Ketua LPPM Universitas Lampung,

Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.

NIP 19650510 199303 2 008



UJI BEDA TINGKAT KINERJA KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PROPINSI DI WILAYAH JAWA DAN SUMATERA

**Agus Zahron Idris
Fadhilah Nuraini**

Abstract

The purpose of this study is to compare the financial performance of the provincial governments in Java and Sumatra in the 2014-2017 period and to determine the differences in the financial performance of the provincial governments in Java and Sumatra in the 2014-2017 period.

The research method used is quantitative research methods. The population in this study is the report of the Realization of Regional Government Revenue and Expenditures of Provincial Governments in Indonesia in 2014-2017. The sample selection uses a purposive sampling technique that is sampling taking into account certain characteristics and criteria.

The results of this study are based on the results of descriptive analysis in mind that the financial performance of provinces in Java is better than provinces in Sumatra. While the results of different tests show that there is no significant difference in the financial performance of the provincial governments in Java and Sumatra because it shows a significance value of more than 0.05.

Key Words: Comparison, Financial Performance, Local Government

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4). Salah satu solusi untuk pemerintah daerah dalam memperbaiki segala kesalahan yang telah terjadi, Anggaran Berbasis Kinerja dapat menjadi jawabannya. Anggaran Berbasis Kinerja pada dasarnya digunakan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat pada pendekatan anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan tidak adanya tolok ukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Pendekatan ini menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output sehingga jelas tujuan dan sasaran kinerjanya (Mardiasmo, 2013).

Analisa prestasi dalam hal ini adalah kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk memenuhi seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah. Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Seiring sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

yaitu mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lahirlah tiga paket perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, yang telah membuat perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya dalam perencanaan dan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Kemudian saat ini keluar peraturan tentang Pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah RI No 58 tahun 2004 dan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menggantikan Kepmendagri No. 29 tahun 2002. Dalam reformasi anggaran tersebut, proses penyusunan APBD diharapkan menjadi lebih partisipasi. Hal tersebut sesuai dengan permendagri No.13 tahun 2006 yaitu dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD diawali dengan penjangkaran aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategi daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah. Serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah.

Berdasarkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), pemerintah diharuskan untuk bertindak berdasarkan *cost minded* dan menggunakan dana secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, Pemerintah daerah harus menyusun program dan tolok ukur sebagai standar kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan anggaran berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), pemerintah daerah tidak hanya diwajibkan menyusun fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja, tetapi juga merencanakan kegiatan yang ingin dicapai dalam bentuk

keluaran atau hasil program yang akan dilaksanakan. Rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, dicapainya hasil yang optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, tercapainya efisiensi, peningkatan produktivitas dalam pengelolaan sumber daya, serta peningkatan kualitas produk dan jasa, untuk mewujudkan kesinambungan nasional dalam mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,06 persen, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 5,01 persen. Sedangkan secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03 persen. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, secara spasial atau wilayah pertumbuhan ekonomi nasional masih didominasi oleh pulau Jawa dan Sumatera dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,51 persen untuk pulau Jawa, dan 4,43 untuk Pulau Sumatera atau di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional. Suhariyanto menegaskan, pertumbuhan ekonomi di kedua Provinsi tersebut mencatatkan kinerja positif jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya seperti Maluku dan Papua yang masih rendah(<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/06/141100126/jawa-dan-sumatera-dominasi-pertumbuhan-ekonomi-nasional>).

Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti mengenai kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera, karena masih terdapat perbedaan hasil penelitiannya dan menarik untuk diteliti. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“UJI BEDA TINGKAT KINERJA KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PROPINSI DI WILAYAH JAWA DAN SUMATERA”**.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas, dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah propinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah propinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penganggaran

Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efektif, efisien, adil, dan merata. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal karena akuntansi manajemen hanyalah alat manajemen untuk perencanaan dan pengendalian.

Penentuan Biaya Pelayanan

Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan biaya berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat terhadap besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik.

Penilaian Kinerja

Penilaian merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukuran untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan.

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja atau *Performance Budgeting* adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategis Organisasi. Anggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumber daya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai *output measurement* sebagai indikator kinerja organisasi. Atau dengan kata lain, anggaran berbasis kinerja adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja dan *unit cost* dari setiap kegiatan yang tersruktur.

Pengertian anggaran berbasis kinerja menurut pandangan *Government Performance Result Act* dalam Yuwono, Indrajaya & Hariyandi (2015: 35) adalah sebagai berikut :

“Performance budgeting is a systematic approach to help government become more responsive to taxpaying public by linking program funding to performance and production.”

Government of Alberta, Canada dalam Yuwono, Indrajaya & Hariyandi (2015: 35) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut :

“...is a system of planning, budgeting, and evaluation that emphasizes the relationship between money budgeted and result ecpected.”

Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan pada hasil yang ingin dicapai atau bisa juga diartikan bahwa dengan sejumlah dana yang telah dianggarkan, pemerintah dapat mencapai hasil sesuai dengan harapan masyarakat.

Tahap-tahap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan output yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan output tersebut. Menurut Nordiawan (2006), ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu :

1. Penetapan Visi dan Misi Organisasi

Visi dan Misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh organisasi.

2. Pembuatan Tujuan Strategis

Tujuan dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan strategis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Harus mempresentasikan hasil akhir bukannya keluaran.
- b. Harus dapat diukur untuk dapat menentukan apakah hasil akhir yang diharapkan telah dicapai.
- c. Harus dapat diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan tindakan koreksi.
- d. Harus tepat, artinya tujuan tersebut menimbulkan peluang kecil untuk menimbulkan interpretasi individu.

Tujuan strategis kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis dengan tujuan untuk memastikan agar tujuan strategis dapat terlaksana. Dalam UU No.25 Tahun 2004, rencana strategis daerah disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) yang disusun oleh Kepala Bappeda berupa penjabaran Visi,

Misi, dan Rencana Strategis. RPJM merupakan bahan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah (musrenbang).

3. Penetapan Aktivitas

Langkah selanjutnya yang harus ditempuh dalam penyusunan anggaran berdasarkan anggaran berbasis kinerja adalah penetapan aktivitas atau rencana kerja. Rencana kerja dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang ditetapkan. Pemerintah kemudian membuat sebuah paket keputusan yang berisi beberapa alternatif keputusan atas setiap rencana kerja atau aktivitas. Alternatif keputusan tersebut menjadi identitas dan penjelasan bagi rencana kerja yang bersangkutan. Pembuatan alternatif keputusan dapat menegaskan ciri pendekatan berbasis kinerja yang digunakan terutama dalam dua hal, yaitu :

- a. Pernyataan tujuan operasional secara eksplisit yang menjamin adanya keterkaitan antara strategi organisasi, tujuan operasional, dan anggaran yang akan memberikan jaminan bahwa aktivitas yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan baik.
- b. Adanya pernyataan tentang input, output, dan *outcome* yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan kinerja.

4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Tahap berikutnya adalah evaluasi dan pengambilan keputusan. Proses ini dilakukan dengan standar baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kinerja Keuangan

Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. "Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien" (Mardiasmo 2002:121). Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan output/ input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. "Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan-perbandingan *outcome* dengan *output*" (Mardiasmo, 2002: 4). Adapun arti dari penilaian kinerja menurut Mardiasmo (2002:28) "yaitu penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya." Dan menurut keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lain yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Parameter Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Analisis rasio keuangan pada APBD keuangan pada APBD dilakukandengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan denganperiode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yangterjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasiokeuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yangterdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimanarasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

a. Rasio kemandirian keuangan daerah

Menurut Widodo (Halim, 2004 : 284) Kemandirian keuangan daerah atau otonomi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

Tabel 4. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
--------------------	-------------	---------------

Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25-50%	Konsultatif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber: Tatyana, 2016

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

b. Rasio efektifitas

Menurut Widodo (Halim, 2004 : 285) Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Tabel 5. Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
------------	----------

$x > 100 \%$	Efektif
$x = 100 \%$	Efektifitas Berimbang
$x < 100 \%$	Tidak Efektif

Sumber: Tatyana, 2016

b. Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudin (2007 : 152) rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan daerah semakin baik. semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 6. Kriteria Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100 % Ke atas	Efisiensi
100 %	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100 %	Inefisiensi

Sumber: Tatyana, 2016

c. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012 : 236) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung

semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Kesenjangan ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

a. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Menurut Mahmudin (2017 : 152) di dalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 7. Kriteria Pengukuran Rasio Belanja Operasi

Persentase	Kriteria
100 % Ke atas	Efektif
100 %	Efektifitas Berimbang
Kurang dari 100 %	Tidak Efektif

Sumber: Tatyana, 2016

- b. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Menurut Mahmudin (2007 : 152), pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Daerah} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 8. Kriteria Pengukuran Rasio Belanja Modal

Persentase	Kriteria
100 % Ke atas	Efektif
100 %	Efektifitas Berimbang
Kurang dari 100 %	Tidak Efektif

Sumber: Tatyana, 2016

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan

masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010), rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t-1)} \times 100 \%$$

Tabel 9. Kriteria Pengukuran Rasio Pertumbuhan

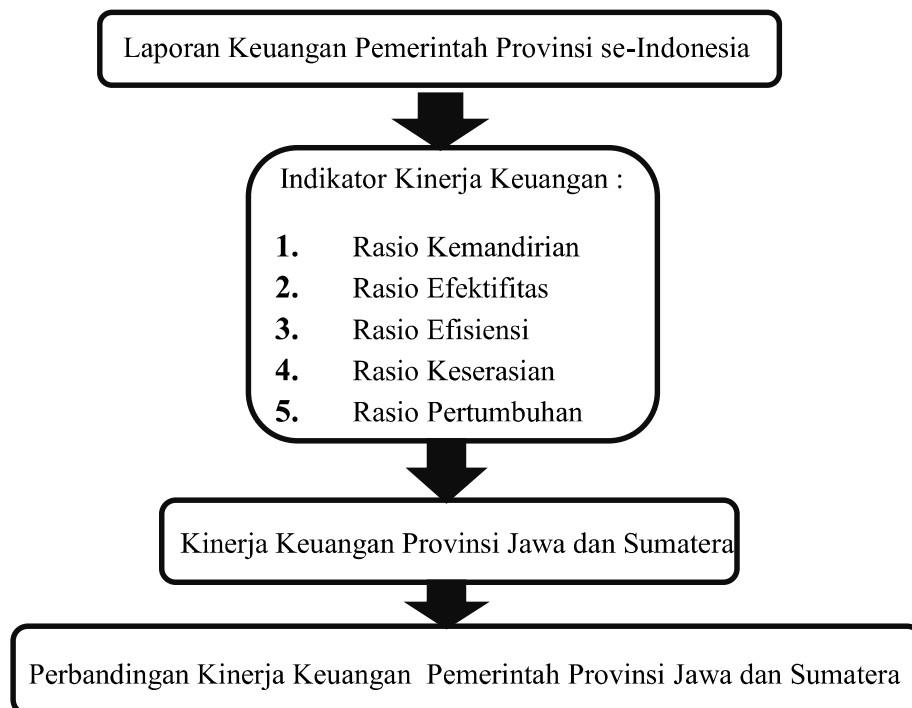
Persentase	Kriteria
------------	----------

100 % Ke atas	Efektif
100 %	Efektifitas Berimbang
Kurang dari 100 %	Tidak Efektif

Sumber: Tatyana, 2016

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Halim (2008), untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

Kerangka Pikir



Uji Hipotesis

Uji Hipotesis yang dilakukan untuk memprediksi kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi yang ada di Indonesia pada tahun-tahun yang akan

datang. Perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai variabel berdasarkan nilai anggaran dana pendapatan dan belanja daerah Provinsi se-Indonesia pertahun. Data kuantitatif berupa laporan perhitungan APBD Pemerintah Provinsi di provinsi Jawa dan Sumatera periode anggaran tahun 2014 sampai dengan 2017. Hipotesis yang akan diuji untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan tingkat kemandirian pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.

H2: Terdapat perbedaan tingkat efektivitas pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.

H3: Terdapat perbedaan tingkat efisiensi pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.

H4: Terdapat perbedaan tingkat aktivitas belanja operasi pada kinerja keuangan provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.

H5: Terdapat perbedaan tingkat aktivitas belanja modal / belanja pembangunan pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.

H6: Terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PAD pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.

III. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian berbentuk deskriptif. Menurut Erlina (2007:64), “Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subjek beberapa individu., organisasional, industri, atau perspektif lain”. Menurut Sugiyono (2007:11), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data melalui pencatatan ataupun softcopy atas data-data yang diperlukan yang diperoleh dari www.djpk.depkeu.go.id yang merupakan website/situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah

(APBD) dan Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah dari provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari website/situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah dari provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.

Data yang dikumpulkan serta digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah data sekunder yang merupakan data–data yang diperoleh dari dokumen resmi serta sumber–sumber lainnya yaitu, data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi di Jawa dan di Sumatera Tahun 2014-2017.

Metode Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang relevan untuk mendukung analisis pembahasan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1) Penelitian Lapangan

Penelitian ini digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data utama yang akan digunakan untuk melakukan analisis terkait permasalahan yang ingin penulis jawab. Penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen, catatan dan laporan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sebagai dasar analisis yang akan

dilakukan penulis. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen yang sudah ada. Data dalam penelitian ini berasal dari data Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah dari provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan dasar-dasar mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur, majalah dan tulisan ilmiah yang sifatnya mendukung penelitian yang dilakukan peneliti.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Erlina (2008) definisi operasional menjelaskan karakteristik dari objek dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi dan menyebabkan konsep dapat diukur serta dioperasionalkan dalam penelitian. Untuk memberikan gambaran yang jelas serta memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan definisi variabel operasional yang akan diteliti. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Anggaran Berbasis Kinerja sementara variabel dependen dari penelitian ini adalah Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera.

1. Variabel Independen

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, variabel independen dalam penelitian ini adalah Anggaran Berbasis Kinerja. Anggaran berbasis Kinerja adalah sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau keluaran (*output*) dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan

penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Kinerja Keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan yang dijabarkan dalam bentuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Anggaran tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Metode Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dengan metode ini adalah:

1. Metode Deskriptif

Metode analisa dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklasifikasi, dianalisa, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Dalam hal ini analisa data akan dilakukan dengan menggunakan:

a. Rasio keuangan daerah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Rasio keuangan daerah yang digunakan yaitu:

- 1) Rasio Kemandirian
- 2) Rasio Efektifitas
- 3) Rasio Efisiensi
- 4) Rasio Keserasian
- 5) Rasio Pertumbuhan

b. Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan

Data penelitian ini sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah data penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Test. Syarat normal tidaknya data terlihat dari probabilitas signifikansinya. Apabila probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal, sedangkan apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal. Beberapa kemungkinan pilihan alat uji statistik atas hasil penelitian setelah dilakukan uji normalitas adalah:

1) Uji Kolmogorov Smirnov adalah pengujian lebih dari dua sampel.

Asumsi yang digunakan pada uji independent sample t-test:

- a) Populasi-populasi yang akan diuji berdistribusi normal
- b) Varians dari populasi-populasi tersebut adalah sama (Homogeneity of variance)
- c) Sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain

Kriteria uji asumsi Homogenitas:

- a. Jika signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima (varian sama)
- b. Jika signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak (varian berbeda)

Kriteria uji independent sample t-test:

- a. H_0 diterima apabila signifikansinya $> 0,05$
- b. H_0 ditolak apabila signifikansinya $< 0,05$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Data

1. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah atau otonomi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Jawa dan di Sumatera Tahun 2014-2017

Provinsi	Rasio Kemandirian (2014)	Rasio Kemandirian (2015)	Rasio Kemandirian (2016)	Rasio Kemandirian (2017)
	(PAD/Total Pendapatan)*100	(PAD/Total Pendapatan)*100	(PAD/Total Pendapatan)*100	(PAD/Total Pendapatan)*100
Aceh	69,31152264	75,23067644	81,85355644	90,62451538
Sumatera Utara	91,27216788	91,89813066	81,19721658	80,44467860
Sumatera Barat	99,85110770	93,23418471	94,83515019	99,45724963
Riau	96,96398280	79,66222999	99,18615695	84,40652695
Jambi	81,92029269	92,46383426	91,06513103	92,16282921
Sumatera Selatan	96,26339567	93,96349001	91,12377384	91,2750903
Bengkulu	99,73088431	95,73169079	90,89740967	90,10375889
Lampung	78,71699686	57,94424843	88,34068261	94,57931122

Babel	99,83886905	83,47557981	87,92736497	83,57040348
Kepulauan Riau	88,30343881	91,01243753	97,36256085	89,880325
Jakarta	95,11246985	82,25550618	96,85704641	82,22935848
Jawa Barat	90,53538535	93,15369932	90,34470751	91,73571921
Jawa Tengah	97,68082902	95,96155562	94,91691382	92,98552939
D.I.Y	78,11640728	55,70070501	98,47777303	87,81259439
Jawa Timur	94,76149095	98,96911682	94,30178745	95,32784921
Banten	97,90392058	95,94012031	99,71019388	82,64759682

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2014, rasio kemandirian terendah terdapat pada Provinsi Aceh dengan rasio sebesar 69,31%, sedangkan rasio kemandirian tertinggi terdapat pada Provinsi Babel dengan rasio kemandirian sebesar 99,83%.

Pada tahun 2015, rasio kemandirian terendah terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan rasio sebesar 55,70%, dan rasio kemandirian terendah kedua terdapat pada Provinsi Lampung dengan rasio sebesar 57,94%. Sedangkan rasio kemandirian tertinggi terdapat pada Provinsi Jawa Timur dengan rasio kemandirian sebesar 98,96%.

Pada tahun 2016, rasio kemandirian terendah terdapat pada Provinsi Sumatera Utara dengan rasio sebesar 81,19%, sedangkan rasio kemandirian tertinggi terdapat pada Provinsi Banten dengan rasio kemandirian sebesar 99,71%.

Pada tahun 2017, rasio kemandirian terendah terdapat pada Provinsi Sumatera Utara dengan rasio sebesar 80,44%, sedangkan rasio kemandirian tertinggi terdapat pada Provinsi Sumatera Barat dengan rasio kemandirian sebesar 99,45%.

2. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 2. Rasio Efektifitas Kinerja Keuangan Provinsi di Jawa dan di Sumatera 2014-2017

Provinsi	Rasio Efektifitas (2014)	Rasio Efektifitas (2015)	Rasio Efektifitas (2016)	Rasio Efektifitas (2017)
	(Realisasi/Anggaran) x100%	(Realisasi/Anggaran) x100%	(Realisasi/Anggaran) x100%	(Realisasi/Anggaran) x100%
Aceh	100,5790458	93,09256610	97,92727675	95,29101596
Sumatera Utara	82,85778401	78,94445803	97,42939481	94,08977851
Sumatera Barat	100,5457122	95,60229446	100,5180276	99,00989977
Riau	109,8882259	63,31246504	93,30348533	68,14755914
Jambi	103,0124939	87,48130811	96,01770512	91,74396672
Sumatera Selatan	103,8816461	96,43949417	104,6187676	114,9146343
Bengkulu	104,7187037	110,0141361	101,8649788	107,2245026
Lampung	101,1103428	103,6171894	104,3611192	106,4889164
Babel	100,1061886	119,6595874	100,6281852	117,7831395
Kepulauan Riau	108,2760964	110,7162388	105,8785779	108,0338049
Jakarta	148,4156018	168,3880203	127,3698447	138,7025741
Jawa Barat	94,83584351	115,8105556	98,93359846	112,6203703
Jawa Tengah	105,0766917	106,3163162	92,34707049	110,1611778
D.I.Y	100,5060416	116,2920500	98,75727231	108,8566773
Jawa Timur	106,0689620	104,7537645	100,1248167	106,2118114
Banten	127,1399544	127,1399544	104,2827928	114,7687609

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2014, rasio efektifitas terendah terdapat pada Provinsi Sumatera Utara dengan rasio sebesar 82,85%, dan terendah kedua adalah pada Provinsi Jawa Barat dengan rasio sebesar 94,83% dengan kriteria tidak efektif. Sedangkan rasio efektifitas tertinggi terdapat pada Provinsi Jakarta dengan rasio efektifitas sebesar 148,41%.

Pada tahun 2015, terdapat 6 provinsi yang memiliki rasio efektifitas terendah yaitu Provinsi Riau dengan rasio 63,31%, Sumatera Utara dengan rasio 78,94%, Jambi dengan rasio 87,48 %, Aceh, dengan rasio 93,09 %, Sumatera Barat dengan rasio 95,60%, dan Sumatera Selatan dengan rasio 96,43%. Sedangkan rasio efektifitas tertinggi terdapat pada Provinsi Jakarta dengan rasio efektifitas sebesar 168,38%.

Pada tahun 2016, terdapat 7 provinsi yang memiliki rasio efektifitas terendah yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan rasio 92,34%, Riau dengan rasio 93,30%, Jambi dengan rasio 96,01 %, Jawa Barat dengan rasio 98,93 %, DIY dengan rasio 98,75%, dan Sumatera Utara dengan rasio 97,42%, dan Aceh dengan rasio 97,92%. Sedangkan rasio efektifitas tertinggi terdapat pada Provinsi Jakarta dengan rasio efektifitas sebesar 127,36%.

Pada tahun 2017, terdapat 5 provinsi yang memiliki rasio efektifitas terendah yaitu Provinsi Riau dengan rasio 68,14%, Jambi dengan rasio 91,74 %, dan Sumatera Utara dengan rasio 94,08%, Aceh dengan rasio 95,29% dan Sumatera Barat dengan rasio 99,00%. Sedangkan rasio efektifitas tertinggi terdapat pada Provinsi Jakarta dengan rasio efektifitas sebesar 138,70%.

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan daerah semakin baik.

Tabel 3. Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Provinsi di Jawa dan di Sumatera 2014-2017

Provinsi	Rasio Efisiensi (2014)	Rasio Efisiensi (2015)	Rasio Efisiensi (2016)	Rasio Efisiensi (2017)
	(Realisasi BD/Realisasi PAD) x100%	(Realisasi BD/Realisasi PAD) x100%	(Realisasi BD/Realisasi PAD) x100%	(Realisasi BD/Realisasi PAD) x100%
Aceh	96,69203070	63,75774209	73,48785162	78,97393096
Sumatera Utara	105,9967654	95,12824087	58,34892386	109,4144306
Sumatera Barat	101,6092146	71,93257996	168,2003722	110,6813642
Riau	100,4719532	112,8098854	80,74805383	103,1319749
Jambi	117,2737469	117,7587413	121,1925720	113,7230802
Sumatera Selatan	100,6399541	112,2068598	105,7319394	79,20626730
Bengkulu	97,44166795	113,7659183	100,5678974	103,5054102
Lampung	75,48950471	163,2246751	114,3301836	123,2261533
Babel	97,60490079	119,4663238	99,55890176	117,5349765
Kepulauan Riau	103,0089452	279,1936224	50,43483206	45,62514080
Jakarta	93,78512833	121,3658802	95,65286822	112,3489165
Jawa Barat	111,2023717	108,2640552	120,3580726	133,9514113
Jawa Tengah	100,2064155	111,1640570	119,1152092	140,0477310
D.I.Y	77,09219636	175,1177814	31,61821431	41,51354870
Jawa Timur	103,9657697	110,7915512	121,9958215	136,6150202
Banten	105,319947	59,32388326	99,67775437	152,6709672

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2014, terdapat 6 provinsi dengan rasio inefisiensi, yaitu terdapat pada Provinsi Lampung dengan rasio sebesar 75,48%, DIY dengan rasio 77,09%, Jakarta dengan rasio 93,78%, Aceh dengan rasio 96,69%, Bengkulu dengan rasio 97,44%, dan Babel dengan rasio 97,60%. Sedangkan rasio efisiensi tertinggi terdapat pada Provinsi Jambi dengan rasio efisiensi sebesar 117,27%.

Pada tahun 2015, terdapat 4 provinsi yang memiliki rasio inefisiensi yaitu Provinsi Banten dengan rasio 59,32%, Aceh dengan rasio 63,75%, Sumatera Barat dengan rasio

71,93%, dan Sumatera Utara dengan rasio 95,12%. Sedangkan rasio efisiensi tertinggi terdapat pada Kepulauan Riau dengan rasio efisiensi sebesar 279,19%.

Pada tahun 2016, terdapat 6 provinsi dengan rasio inefisiensi, yaitu terdapat pada Provinsi DIY dengan rasio sebesar 31,61%, Sumatera Utara dengan rasio sebesar 58,34%, Aceh dengan rasio 73,48%, Riau dengan rasio 80,74%, Babel dengan rasio 99,55%, dan Banten dengan rasio 99,67%. Sedangkan rasio efisiensi tertinggi terdapat pada Provinsi Sumatera Barat dengan rasio efisiensi sebesar 168,20%.

Pada tahun 2017, terdapat 4 provinsi dengan rasio inefisiensi, yaitu terdapat pada Provinsi DIY dengan rasio sebesar 41,51%, Kepulauan Riau dengan rasio sebesar 45,62%, Aceh dengan rasio 78,97% , dan Sumatera Selatan dengan rasio 79,20%. Sedangkan rasio efisiensi tertinggi terdapat pada Provinsi Banten dengan rasio efisiensi sebesar 152,67%.

4. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian dibagi atas rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

a. Rasio Belanja Operasi

Tabel 4. Rasio Belanja Operasi Provinsi di Jawa dan di Sumatera 2014-2017

Provinsi	Rasio Belanja Operasi (2014)	Rasio Belanja Operasi (2015)	Rasio Belanja Operasi (2016)	Rasio Belanja Operasi (2017)
	(RBO/TB) x100%	(RBO/TB) x100%	(RBO/TB) x100%	(RBO/TB) x100%
Aceh	16,14068475	25,1412146	37,28791693	41,14668657
Sumatera Utara	28,68313674	32,71006876	60,55859807	42,3578005
Sumatera Barat	70,4653843	109,7793122	78,35491001	84,0104937
Riau	45,6313008	43,80708296	58,84617837	55,67110063
Jambi	91,91845513	97,22354765	101,5822177	85,93506204
Sumatera Selatan	79,13978165	83,64716443	85,06041642	113,6784349
Bengkulu	91,71924993	112,4391052	143,4794997	119,2708949
Lampung	74,50736189	52,20565229	50,04013612	26,89417471
Babel	147,7971109	84,54561658	152,0730504	156,2404766
Kepulauan Riau	96,81637151	96,87248214	68,25971406	81,97888339
Jakarta	106,6267134	100,17017	104,5446957	94,81433996
Jawa Barat	102,2815159	99,15522482	107,283386	98,36746785
Jawa Tengah	99,79400973	99,53105357	95,61897071	94,43005533
D.I.Y	65,28415005	111,9438325	105,3270688	97,24259274
Jawa Timur	101,5027343	97,67810476	103,8296129	96,99112397
Banten	94,94877544	117,3184283	100,3232874	90,64935324

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 rasio belanja operasi terendah, terdapat pada provinsi Aceh dengan rasio sebesar 16, 14%, sedangkan rasio tertinggi terdapat pada Provinsi Babel dengan rasio 147,79%.

Pada tahun 2015 rasio belanja operasi terendah, terdapat pada provinsi Aceh dengan rasio sebesar 25, 14%, sedangkan rasio tertinggi terdapat pada Provinsi Banten dengan rasio 117,31%.

Pada tahun 2016 rasio belanja operasi terendah, terdapat pada provinsi Aceh dengan rasio sebesar 37,28%, sedangkan rasio tertinggi terdapat pada Provinsi Babel dengan rasio 152,07%.

Pada tahun 2017 rasio belanja operasi terendah, terdapat pada provinsi Lampung dengan rasio sebesar 26,89%, sedangkan rasio tertinggi terdapat pada Provinsi Babel dengan rasio 156,24%.

b. Rasio Belanja Modal

Tabel 5. Rasio Belanja Operasi Provinsi di Jawa dan di Sumatera 2014-2017

Provinsi	Rasio Belanja Modal (2014)	Rasio Belanja Modal (2015)	Rasio Belanja Modal (2015)	Rasio Belanja Modal (2017)
	(RBM/TB) x100%	(RBM/TB) x100%	(RBM/TB) x100%	(RBM/TB) x100%
Acch	103,9077835	104,1706781	107,4199629	96,25387152
Sumatera Utara	94,34250151	101,8940723	96,85984833	106,3947633
Sumatera Barat	98,56302372	102,3911584	104,368344	101,391665
Riau	102,6466332	92,94861952	118,5173481	95,43983916
Jambi	104,0896872	108,5036135	98,17076535	95,14724569
Sumatera Selatan	99,3641153	94,84653125	103,6124083	144,1334444
Bengkulu	102,6255011	98,13288937	104,3245586	98,41512502
Lampung	132,4687457	100,4238817	101,6092609	95,72467244
Babel	102,4538719	100,2755507	106,9875765	97,19159734
Kepulauan Riau	109,9379016	99,19336081	103,3081634	86,25604535
Jakarta	106,6267134	100,17017	104,5446957	101,8427916
Jawa Barat	99,32706339	94,47412227	101,743104	98,36746785
Jawa Tengah	99,79400973	99,53105357	100,4732511	94,43005533
D.I.Y	129,7148151	111,9438325	105,8600676	97,24259274
Jawa Timur	96,18550438	97,67810476	103,8296129	96,99112397
Banten	94,94877544	117,6594124	100,3232874	90,64935324

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 rasio belanja modal terendah, terdapat pada provinsi Sumatera Utara dengan rasio sebesar 94,34%, sedangkan rasio tertinggi terdapat pada Provinsi Lampung dengan rasio 132,46%.

Pada tahun 2015 rasio belanja modal terendah, terdapat pada provinsi Riau dengan rasio sebesar 92,94%, sedangkan rasio tertinggi terdapat pada Provinsi Banten dengan rasio 117,65%.

Pada tahun 2016 rasio belanja modal terendah, terdapat pada provinsi Sumatera Utara dengan rasio sebesar 96,85%, sedangkan rasio tertinggi terdapat pada Provinsi Riau dengan rasio 118,51%.

Pada tahun 2017 rasio belanja modal terendah, terdapat pada provinsi Kepulauan Riau dengan rasio sebesar 86,25%, sedangkan rasio tertinggi terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan dengan rasio 144,13%.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Tabel 6. Rasio Pertumbuhan Provinsi di Jawa dan di Sumatera 2014-2017

Provinsi	Rasio Pertumbuhan (2014)	Rasio Pertumbuhan (2015)	Rasio Pertumbuhan (2016)	Rasio Pertumbuhan (2017)
	(Pendapatan tahun t- pendapatan tahun t-1) / pendapatan tahun t-1x100%	(Pendapatan tahun t- pendapatan tahun t-1) / pendapatan tahun t-1x100%	(Pendapatan tahun t- pendapatan tahun t-1) / pendapatan tahun t-1x100%	(Pendapatan tahun t- pendapatan tahun t-1) / pendapatan tahun t-1x100%
Aceh	43,6004492	-2,61894642	-37,56258039	-15,23096254
Sumatera Utara	9,56242447	5,274769974	9,704368254	-0,940780606
Sumatera Barat	-1,436976283	8,820521846	-31,33059712	66,48115551
Riau	3,131077246	22,29334709	-16,46998459	27,46208702
Jambi	-3,75468415	3,901160401	4,326279363	13,24408736
Sumatera Selatan	3,221078589	3,103276794	11,41335406	3,678576956
Bengkulu	2,902427668	1,512295803	31,88698456	16,00663884
Lampung	3,100101877	2,55214738	7,515827144	-6,990437914
Babel	2,619223212	16,73788825	13,41771307	4,749427144
Kepulauan Riau	9,9379016	-0,057131358	152,0512436	12,16381201
Jakarta	5,13868493	8,444231939	6,341921554	14,16426458
Jawa Barat	-0,672936614	8,076755365	5,46164615	4,24407507
Jawa Tengah	2,163352554	2,001740929	11,86047531	2,558022823
D.I.Y	28,01407987	8,116502438	10,87991661	0,180048913
Jawa Timur	2,560008176	-1,480486521	13,57523328	1,275152468
Banten	2,140955544	7,475743164	-33,03366893	2,835507289

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 hampir semua provinsi mengalami pertumbuhan positif, kecuali Provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Jawa Barat.

Pada tahun 2015 hampir semua provinsi mengalami pertumbuhan positif, kecuali Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur.

Pada tahun 2016 hampir semua provinsi mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pada tahun 2017 Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan Banten.

hampir semua provinsi mengalami pertumbuhan positif, kecuali Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung.

Uji Beda

Uji independent sample t-test adalah uji statistik parametrik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan mean antara dua kelompok data yang independent atau

tidak terkait. Uji independent sample t-test pada prinsipnya membandingkan rata-rata dari dua group yang tidak berhubungan satu sama lain dengan tujuan apakah kedua group tersebut memiliki rata-rata yang sama atau tidak.

Tabel 7. Hasil Uji Beda Independent Sample t-test

Rasio	Kelas	F	Sig.
Kemandirian	Sumatera	1.529	0.237
	Jawa		
Efektifitas	Sumatera	8.930	0.010
	Jawa		
Efisiensi	Sumatera	0.394	0.540
	Jawa		
Belanja Operasi	Sumatera	2.622	0.128
	Jawa		
Belanja Modal	Sumatera	0.421	0.527
	Jawa		
Pertumbuhan	Sumatera	0.031	0.863
	Jawa		

Sumber : olah data SPSS V.20, 2019

1. Berdasarkan hasil uji beda independent sample t-test pada rasio kemandirian menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai asymp sig adalah sebesar 0,237 (23,7%). Pada penelitian ini nilai asymp sig lebih besar dari 0,05 maka H1 tidak terdukung, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian, pada Pemerintah Provinsi di Jawa dan Sumatera tahun 2014-2017. Nilai yang terdukung sebesar 76,3% (100% - 23,7%) maka dapat dinyatakan bahwa kedua populasi memiliki kesamaan ragam atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan ragam varian rasio kemandirian dari kedua kelompok provinsi tersebut.

2. Berdasarkan hasil uji beda independent sample t-test pada rasio efektifitas di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai asymp sig adalah sebesar 0,010 (1%). Pada penelitian ini nilai asymp sig lebih kecil dari 0,05 maka H2 terdukung, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio efektifitas, pada Pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017. Nilai yang tidak terdukung sebesar 99% (100% - 1%) maka dapat dinyatakan bahwa kedua populasi memiliki kesamaan ragam atau dengan kata lain terdapat perbedaan ragam varian rasio efektifitas dari kedua kelompok provinsi tersebut.
3. Berdasarkan hasil uji beda independent sample t-test pada rasio efisiensi di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai asymp sig adalah sebesar 0,540 (54%). Pada penelitian ini nilai asymp sig lebih besar dari 0,05 maka H3 tidak terdukung, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio efisiensi, pada Pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017. Nilai yang terdukung sebesar 46% (100% - 54%) maka dapat dinyatakan bahwa kedua populasi memiliki kesamaan ragam atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan ragam varian rasio efisiensi dari kedua kelompok provinsi tersebut.
4. Berdasarkan hasil uji beda independent sample t-test pada rasio belanja operasi di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai asymp sig adalah sebesar 0,128 (12,8%). Pada penelitian ini nilai asymp sig lebih dari 0,05 maka H4 tidak terdukung, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio belanja operasi, pada Pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017. Nilai yang terdukung sebesar 87,2%

(100% - 12,8%) maka dapat dinyatakan bahwa kedua populasi memiliki kesamaan ragam atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan ragam varian rasio belanja operasi dari kedua kelompok provinsi tersebut.

5. Berdasarkan hasil uji beda beda independent sample t-test pada rasio belanja modal di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai asymp sig adalah sebesar 0,527 (52,7%). Pada penelitian ini nilai asymp sig lebih dari 0,05 maka H5 tidak terdukung, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio belanja modal, pada Pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017. Nilai yang terdukung sebesar 47,3% (100% - 52,7%) maka dapat dinyatakan bahwa kedua populasi memiliki kesamaan ragam atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan ragam varian rasio belanja modal dari kedua kelompok provinsi tersebut.
6. Berdasarkan hasil uji beda beda independent sample t-test di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai asymp sig adalah sebesar 0,863 (86,3%). Pada penelitian ini nilai asymp sig lebih dari 0,05 maka H6 tidak terdukung, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio pertumbuhan, pada Pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017. Nilai yang terdukung sebesar 13,7% (100% - 86,3%) maka dapat dinyatakan bahwa kedua populasi memiliki kesamaan ragam atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan ragam varian rasio pertumbuhan dari kedua kelompok provinsi tersebut.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Dilihat dari rasio kemandirian adalah 0,237 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian H1 tidak terdukung yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017.
2. Dilihat dari rasio efektifitas adalah 0,010 yang artinya lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H2 terdukung, yang berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017.
3. Dilihat dari rasio efisiensi adalah 0,540 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian H3 tidak terdukung, yang berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017.
4. Dilihat dari rasio belanja operasi adalah 0,128 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian H4 tidak terdukung, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017.
5. Dilihat dari rasio belanja modal adalah 0,527 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian H5 tidak terdukung, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017.
6. Dilihat dari rasio pertumbuhan adalah 0,863 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian H6 tidak terdukung, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017.

Saran

Saran yang ingin penulis berikan dalam penelitian ini yaitu :

Bagi pemerintah daerah provinsi se-Indonesiadiharapkan untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kemandirian daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Sabtari. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Grobogan*. Semarang: Jurnal Akuntansi Sektor Publik. Vol.4, No.2:1-10.

- Anggraini, Alia. 2016. *Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kabupaten Pemekaran*. Palembang: Jurnal Akuntansi Sektor Publik. Vol.2, No.4:16-21.
- Anton, M.G. 2016. *Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Untuk Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado*. Manado: Jurnal Emba. Vol.4, No.3:553-563.
- Arif, Bahtiar, dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta :SalembaEmpat.
- Bastian, Indra.2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Cholifah. 2013. Rancangan Model Efektivitas Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur. Surabaya: Jurnal Wiga. Vol.3, No.2:20-30.
- Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan keuangan Daerah Wilayah 3. 2015. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*.
- Erlina, Sri Mulyani, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen, Cetakan Pertama*. Medan : USU Press.
- Garrison, dkk. 2001. *Akuntansi Manajerial*. Jakarata : Salemba Empat.
- Halim, Abdul.2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. UPP AMP YKPN.2001.Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta :Salemba Empat.
- Hansen dan Mowen. 2006. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta :Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur, dkk. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yokyakarta : BPFE.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 2015. *Clean Government dan Good Government Untuk meningkatkan Kinerja Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Kemenpan RB
- Kurrohman, Taufik. 2013. *Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Jawa Timur*. Jember: Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol.5, No.1:1-11.
- Mahmudin.2006.*Analisis kinerja keuangan*.Malang :Edisi kedua.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Sedarmayanti. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Cetakan Kelima*. Bandung : PT Refika Aditama.

Sipayung, Friska. 2009. *Balanced Scorecard: Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Sistem Manajemen Strategis*. Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 2, No.1, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Putra, Erlanda Juliansyah. 2012. *Pengelolaan Kepegawaian Pada Era Otonomi*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 65, April 2015, hal. 37-60. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Yuwono, Sony, dkk. 2015. *Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.